



BPBD

LKJIP 2022

TANGGAP TANGKAS TANGGUH

MENGHADAPI

BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



@bpbdkab.bone



Call:0481112



Bpbd Kab Bone

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





LAPORAN KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BONE

2022



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018 – 2023. LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018- 2023).

Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone



Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Terima Kasih,

KEPALA PELAKSANA BPBD



A.SYARUL SAMSU, S.E.,M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip.19630702 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. UMUM	10
B. ORGANISASI	12
C. ISU STRATEGIS	14
D. ASPEK STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. TUJUAN DAN SASARAN	23
B. STRATEGIS DAN ARAH KEBIAJAKAN	25
C. INDIKATOR KINERJA	26
D. PERJANJIAN KINERJA.....	28
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA.....	31
B. TARGET DAN REALISASI	60
BAB IV PENUTUP	62
A. SIMPULAN UMUM.....	63
B. KENDALA	64
LAMPIRAN	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	18
Tabel 2.1.....	23
Tabel 2.2.....	26
Tabel 2.3.....	27
Tabel 2.4.....	28
Tabel 2.5.....	29
Tabel 3.1.....	31
Tabel 3.2.....	32
Tabel 3.3.....	34
Tabel 3.4.....	40
Tabel 3.5.....	41
Tabel 3.6.....	43
Tabel 3.7.....	48
Tabel 3.8.....	53
Tabel 3.9.....	61



SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Aspek Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan dan Sasaran
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Standar Penilaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
 - 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023
 - 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra
 - 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
 - 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 - 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan Umum
- B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi





PENDAHULUAN

- A. UMUM
- B. ORGANISASI
- C. ISU STRATEGIS
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

BAB

1



PENDAHULUAN

1.



A. UMUM

Mengambarkan mengapa pentingnya akuntabilitas kinerja dan dasar hukum yang mendasari

2.

Struktur Organisasi



B. ORGANISASI

Menggambarkan dasar hukum pembentukan organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kondisi kepegawaian

3.



C. ISU STRATEGI

Isu Strategis, adalah merupakan sebuah kondisi / perkembangan / peristiwa/ trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi.

4.



D. ASPEK STRATEGI

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Organisasi



A. Umum

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang Demokratis, Tranparan, Akuntabel, Efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, Termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) meruapakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah di tetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran srategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah di tegakkan dan di wujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKJ tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati.Walikota Selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir



Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD. Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
 6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
 8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
 9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone mempunyai fungsi sebagai berikut :

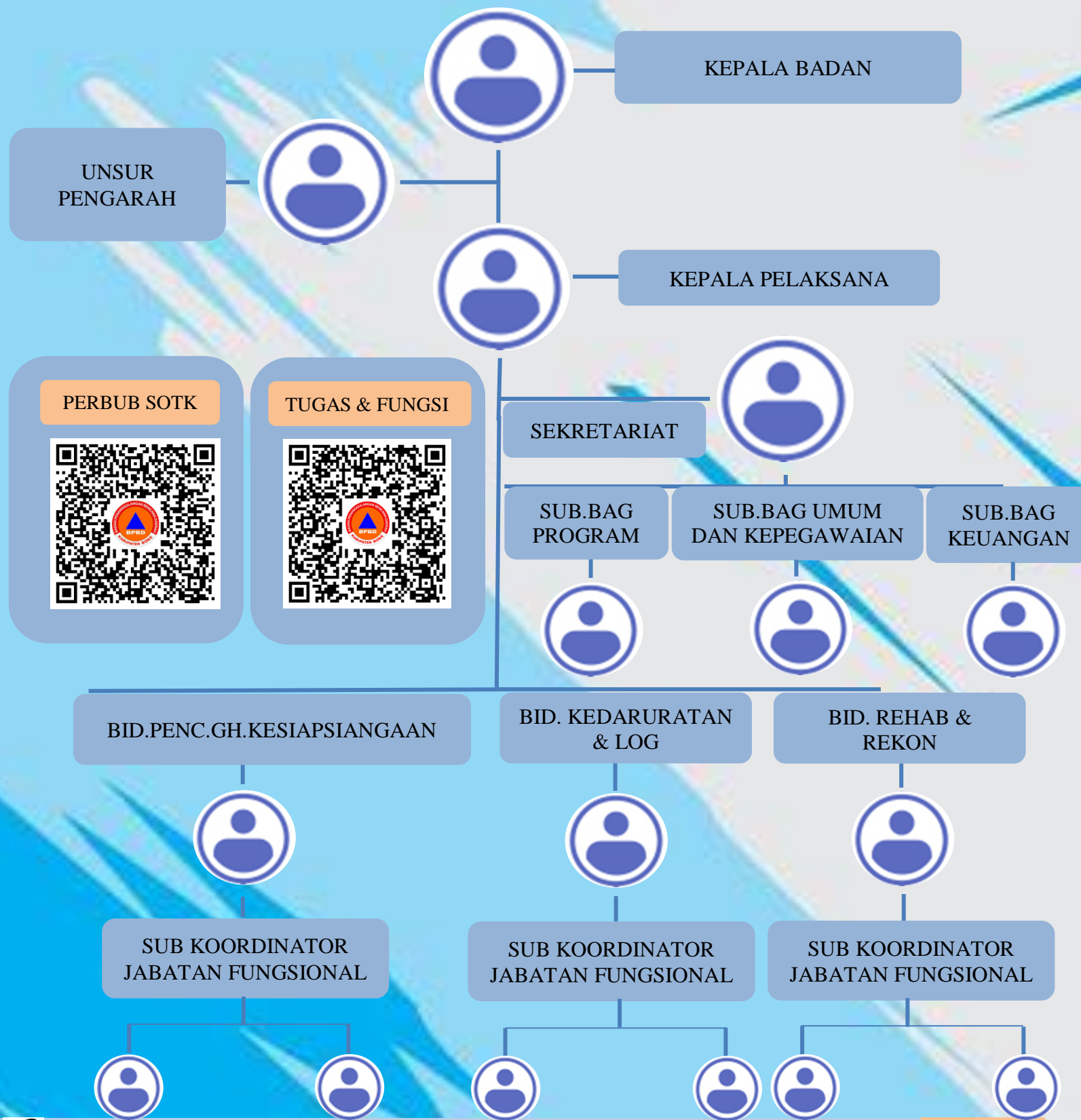
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien:
 1. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 2. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Bone



B. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 98 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi Prabencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dengan rincian

Gambar.1.1 Struktur Organisasi Bdan Penanggulangan Bencana



Adapun Susunan Kepegawaian dan Jumlah Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dapat dilihat pada Tabel :



A. Jumlah ASN Sebanyak 20 Orang



B. Jumlah Honorer Sebanyak 110 Orang

Jumlah ASN Berdasarkan Jumlah Pendidikan

SMA	5
D3	1
S1	5
S2	9

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

Golongan II	4	Golongan III.	9	Golongan IV.	7
-------------	---	---------------	---	--------------	---

Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Laki-laki 13



Perempuan 7

Sumber data: DUK BPBD Tahun 2022



C. Isu Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu Strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renstra tahun 2018-2023 adalah:

- Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat didalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk dan koordinasi lintas sector dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi tidak seutuhnya tanggungjawab pemerintah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi.
- Perlunya system penanggulangan bencana yang handal.
- Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar dilintas sector dan semua bidang. Mengganggu kehidupan masyarakat, oleh sebab itu semua lembaga, pihak, elemen, yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana.
- Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten bone. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana.



D. Aspek Strategis Organisasi

1. Aspek BPBD dalam mencapai Strategi Organisasi melalui (INOVASI)

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah **“GEMAR SIGAB” (Gerakan Masyarakat Siaga Bencana)**.

Inovasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Inovasi ini dimulai dengan pemberian himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menstimulus kesadaran mereka terhadap kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Himbauan ini berupa tulisan dengan warna yang mencolok dan diletakkan di tempat-tempat umum, seperti kantor desa, sekolah dan puskesmas.

Sosialisasi dan simulasi (gladi) yang dilakukan oleh Tim Inovasi BPBD mengambil peran penting dalam program ini. Sosialisasi dan simulasi ini dilakukan oleh tenaga terlatih dari BPBD Kab. Bone. Kegiatan ini melibatkan perwakilan unsur potensi sumberdaya manusia penanggulangan bencana. Kegiatan ini dirancang seperti terjadi bencana banjir besar dan gempa bumi dengan cakupan paparan yang luas. Pelaksanaan ini diawali dengan pembekalan peserta untuk mengingatkan peran masing-masing dalam kejadian bencana yang sebenarnya dan langsung dilakukan gladi. Pada kegiatan gladi tersebut juga untuk menguji kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumberdaya kebencanaan.

Pembinaan pengembangan inovasi dilakukan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan melalui penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan berbagai informasi serta mampu berperan dalam membangun kehidupannya. Penyuluhan sosial merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana alam. Penyuluhan sosial dilakukan agar setiap proses penanggulangan bencana memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif dan berkelanjutan, baik terhadap masyarakat yang terkena bencana maupun terhadap pihak terkait lainnya.

Fungsi penyuluhan sosial dalam upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif, penyuluhan sosial dilakukan untuk mulai menggerakkan masyarakat agar mampu waspada dan mengantisipasi bahaya bencana.
2. Sosialisasi, berfungsi untuk menyebarkan berbagai informasi awal mengenai rencana *tindak mitigasi* bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, *rehabilitasi*, maupun kegiatan *rekonstruksi*.
3. Preparasi, yaitu untuk menyiapkan masyarakat agar selalu siap dan tanggap untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah di wilayah bencana.
4. Promosi, yaitu untuk mendukung pemerintah agar setiap upaya positif dalam *penyuluhan sosial* atas penanggulangan bencana berjalan aktif dan



permanen.

5. Partisipasi, yaitu untuk meningkatkan dukungan dan keterlibatan berbagai *elemen* masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana alam.
6. Desiminasi, yaitu untuk menyebarluaskan program-program pemerintah melalui penyuluhan sosial sebagai upaya penanggulangan bencana alam.

Sebagai kelanjutan dari serangkaian kegiatan ini, maka BPBD Kab. Bone membentuk Tim Gemar Sigab di setiap Desa dan Kelurahan. Tim Gemar Sigab ini bertugas untuk membantu BPBD Kab. Bone untuk mengawasi desa yang didiaminya. Dalam tim ini, Kepala Desa dan Kepala Dusun menjadi penggerak utama. Anggota-anggota Tim Gemar Sigab belajar dan berlatih kegiatan yang harus perlu dilakukan dalam masa pra-bencana, masa tanggap darurat, dan masa pasca bencana. Tim ini akan dipimpin oleh orang yang disepakati masyarakat. Tugas ini tidak harus menjadi beban pemimpin formal (Ketua RT/ RW/ Kelurahan) namun bisa diambil dari anggota masyarakat yang disepakati. Tugas Tim Gemar Sigab ini antara lain:

1. Menyiapkan tanda bahaya yang disepakati dan mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat;
2. Menyiapkan tempat evakuasi dan melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan (tenda, genset dan lampu-lampu, bahan makanan kering, air minum dalam kemasan, peralatan masak dll);
3. Menginventarisasi potensi warga dalam hal keahlian misalnya dokter, perawat, instalasi listrik, tukang masak,;
4. Menginventarisir sarana yang diperlukan misalnya kendaraan, alat komunikasi, alat P3K. dll.

Tim ini memiliki struktur sendiri yang terdiri dari:

1. Koordinator Umum Tim
2. Seksi Siaga, bertugas untuk peringatan dini dan pemetaan.
3. Seksi Tanggap Darurat, bertugas untuk menyiapkan penyelamatan, pengungsian dan mengurus logistik.
4. Seksi Komunikasi, bertugas untuk mendokumentasikan dan menjalin informasi hubungan luar.
5. Seksi Kesejahteraan, bertugas untuk melakukan pertolongan pertama dan dapur umum.
6. Tim ini tetap berkoordinasi dan melakukan konsultasi langsung dengan pihak BPBD Kab. Bone.

Adapun inovasi **DengSiba (Desa Siaga Bencana Peduli Difable)**. Dalam Upaya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, Badan Penanggulangan Desa Ramah Anak di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Dua Boccoe, Kec.amatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Cina, Kecamatan Awangpone, dan Kecamatan Libureng di implementasikan melalui kegiatan rintisan desa ramah anak dengan pengembangan inovasi **Deng Siba (Desa Siaga Bencana Peduli Difable)**. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan advokasi (pendampingan langsung) untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak serta merubah



meandset (Pola Pikir) masyarakat terhadap kaum Disabilitas (Difable). Selama ini program dan kegiatan termasuk pembangunan, anak-anak hanya dijadikan objek dan tidak semua haknya terpenuhi, termasuk untuk berkumpul dan berpendapat itu belum ada ruang untuk anak kedepan, ingin dalam pembangunan dipikirkan juga untuk kenyamanan serta keselamatan anak.

Dengan memberikan kegiatan rintisan desa ramah anak khususnya di BPBD ada upaya penanganan terhadap korban khususnya anak khususnya kaum disabilitas (Difable) atau berkebutuhan khusus baik sebelum saat dan setelah bencana yang menimpa anak itu lebih mahal di bandingkan dengan upaya pencegahan. Pendekatan melalui system itulah yang akan dilakukan bersama dalam menciptakan suatu lingkungan yang terlindungi bagi anak dalam memenuhi hak-hak mereka

Jumlah anak penyandang disabilitas dalam keterlibatan penyelenggaraan penanggulangan bencana laki-laki dan perempuan:

✚ Laki-laki : 3.304 orang

✚ Perempuan : 3.078 orang

Tujuan dari inovasi Deng Siba ini yaitu memberikan peluang atau adanya keterlibatan difable dalam penanggulangan bencana. Manfaatnya yaitu meningkat ya kepedulian masyarakat terhadap difable dalam setiap program dan kegiatan.

Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022 inovasi **Deng Siba (Desa Siaga Bencana Peduli Difable)** dan **Gemar Sigab (Gerakan Masyarakat Siaga Bencana)** terlaksana melalui pembagian masker, memeberikan himbauan untuk menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi untuk pencegahan peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang merupakan kejadian luar biasa (KLB).

Inovasi **Si Pena (Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah)**. Sekolah siaga bencana merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana (Sekolah Aman Bencana) dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif disekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Tujuan dari sekolah siaga bencana yaitu membangun budaya siaga dan budaya aman sekolah dengan mengembangkan jejaring sesama para berkepentingan (care terhadap bencana) di bidang penanganan bencana, meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tentang belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah, menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah.



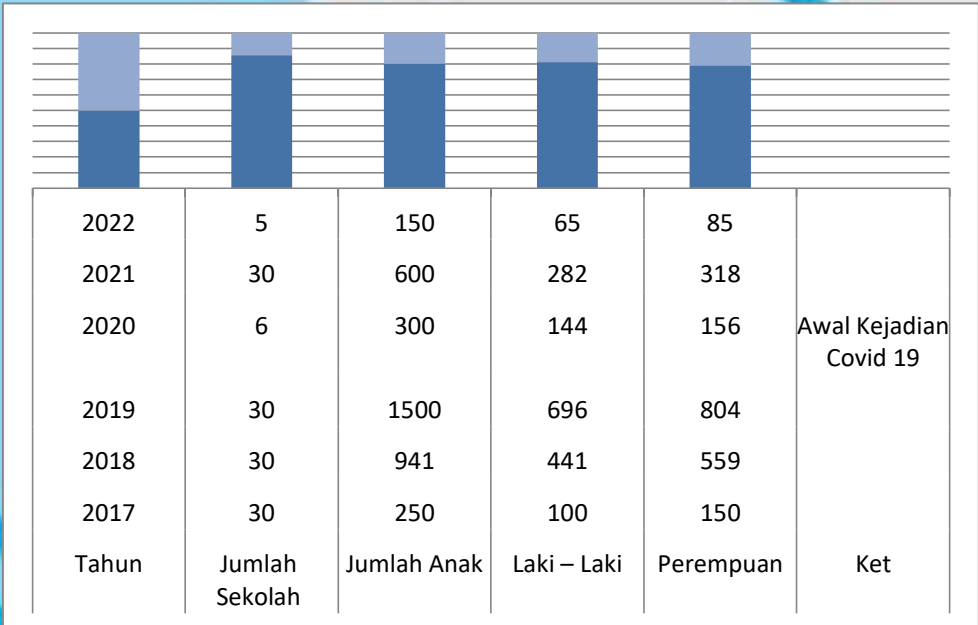
Tabel 1.1
Jumlah Anak Sekolah Yang Menerima Sosialisasi

No.	Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Anak	Laki – Laki	Perempuan	Ket
1	2017	30	250	100	150	
2	2018	30	941	441	559	
3	2019	30	1500	696	804	
4	2020	6	300	144	156	Awal Kejadian Covid 19
5	2021	30	600	282	318	
6	2022	5	150	65	85	

Sumber Data : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Bone

Tujuan dari inovasi **Si Pena** ini yaitu Siswa atau siswi di sekolah megetahui apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan setelah bencana Meningkatkan upaya Sistem Informasi Penanggulangan Bencana.

DIAGRAM.1.1`
Jumlah Anak Sekolah Yang Menerima Sosialisasi



Gambar.1.2 Sosialisasi DENG SIBA



Gambar.1.3 Sosialisasi SIPENA
 Sosialisasi Sipena Di Smp 1 Watampone



Sosialisasi Si Pena Di Smp 2 Watampone



Sosialisasi Si Pena Di Smp 3 Watampone

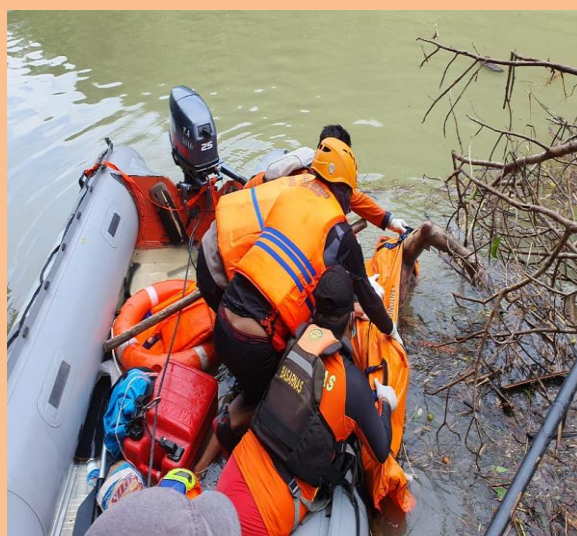


Sosialisasi Si Pena Di Smp 4 Watampone



Sosialisasi Si Pena Di Smp 6 Watampone





PERENCANAAN

- A. Tujuan dan Sasaran
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Standar Penilaian Kinerja

BAB 2



A.Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Tertuang dalam pada Renstra Perubahan dan kaitannya dengan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	BB	A
		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan	-	-	85	90	95
Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani tepat Waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	41%	56%	70%	85%	100%
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	82%	86%	90%	95%	100%
		Presentase Rehabilitasi/Rekonstruk si Daerah Korban pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Data diolah dari BPBD Kab.Bone 2022



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023, maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut

- Peningkatan pelaksanaan administrasi pelaksanaan pemerintah daerah;
- Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana;
- Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi



B.Strategi dan Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan (hapus dan dinarasikan sedikit)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kebijakan penanggulangan bencana dirumuskan sebagai berikut:

VISI: Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

MISI I	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	MISI III	Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya.
TUJUAN	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	TUJUAN	Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana
SASARAN	Meningkatkannya Kinerja Penanggulangan Bencana	SASARAN	Meningkatkannya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencan
STRATEGI	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Daerah	STRATEGI	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana• Meningkatkan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Dan Layanan PUSDALOPS Serta Sarana Dan Prasarana Penanggulangan• Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan
ARAH KEBIJAKAN	Penataan Kelembagaan, Analisa Jabatan, Penatalaksanaan dan Peningkatan Pelayanan	ARAH KEBIAJAKAN	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana• Peningkatan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan• Penyusunan Dokumen dan Penyebarluasan Informasi terkait Penanggulangan Bencana• Pemantauan dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana Disertai Sosialisasi• Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana



			Peningkatan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Layanan Pusdalops serta Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
			<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan Verifikasi Serta Monev Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat bencana • Penyusunan Dokumen Baku Terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berdasarkan Peta Rawan Bencana

Sumber Data: Renstra 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel. 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kesiapsiagan Penanggulan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat}} \times 100\%$	Rekap data kejadian bencana dan rekap data BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan}} \times 100\%$	Data pemantauan daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Tanggap Darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat}}{\text{Jumlah Seluruh korban bencana yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat}} \times 100\%$	Rekap data kejadian bencana dan rekap data BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam masa pasca bencana}}{\text{Jumlah bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi}} \times 100\%$	Rekap data Identifikasi dan verifikasi kerusakan akibat bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sumber Data: PERBUB IKU BPBD Kab. Bone

PERBUB IKU



Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran , Indikator, Kondisi Awal Dan Target Akhir Renstra

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2017	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Responsibilitas Penanganan Penanggulang an Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagan Penanggulan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	%	100	100
		Presentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rwan Bencana	%	11	100
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	74	100
		Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	%	100	100


Sumber Data: Data diolah oleh BPBD Kab.Bone 2022



D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah angggrana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencanaan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.286.016.176,-
	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	90		
Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.011.430.450, <div><div>PK 2022</div></div>
	Persentase Kecamatan yang memiliki Peta Rawan Bencana	85%		
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	95%		
	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana	100%		
Jumlah				Rp. 5.297.446.626,

Sumber Data : Perbub iku dan DPA Perubahan Tahun 2022



E.Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi instansi Pemerintah.Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BPBD Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

KETERANGAN	SKOR
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6(Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (Enam)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (Dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

CAPAIAN
INDIKATOR

=

REALISASI

TARGET

X 100 %





AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun
- B. Realisasi Anggaran

BAB

3



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Penanggualangan Bencana Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

TUJUAN

Tabel. 3.1

MENINGKATKAN RESPONSIBILITAS
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN

SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Persentase Rata -Rata Capaian Kinerja Program Tekinis Badan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana dengan	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana

Sumber Data: Data di olah Oleh BPBD Kab.Bone 2022



1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

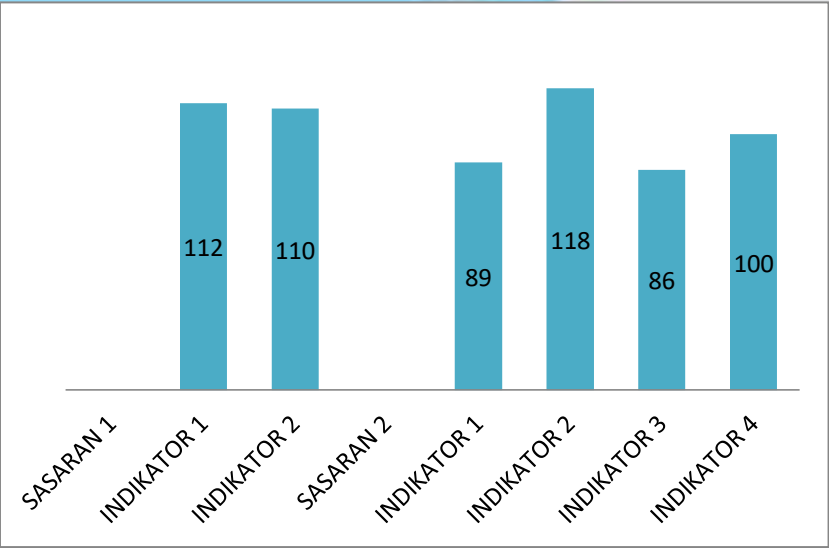
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	A	A	SANGAT BERHASIL
	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	90%	99%	110	BERHASIL
Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	89%	89%	BELUM BERHASIL
	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	85%	100%	118%	SANGAT BERHASIL
	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	95%	82%	86%	BELUM BERHASIL
	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%	SANGAT BERHASIL
RATA- RATA				102,5	BERHASIL

Sumber Data: Data diolah oleh BPBD Kab. Bone 2022



DIAGRAM 2
REALISASI CAPAIAN KINERJA BPBD TAHUN 2022



Berdasarkan data di atas, rata-rata Capaian Kinerja rata-rata capaian kinerja **102,5%** dengan capaian sasaran 1 yaitu 112% dan 110% sasaran 2 yaitu 89%,118%, 86%,100% maka dapat disimpulkan capaian BPBD Kab. Bone melampaui target yang telah ditentukan sehingga persentase capaian diberi kategori ***Sangat Berhasil***



2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023 Adapun Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya diperoleh Matriks Sebagai Berikut:

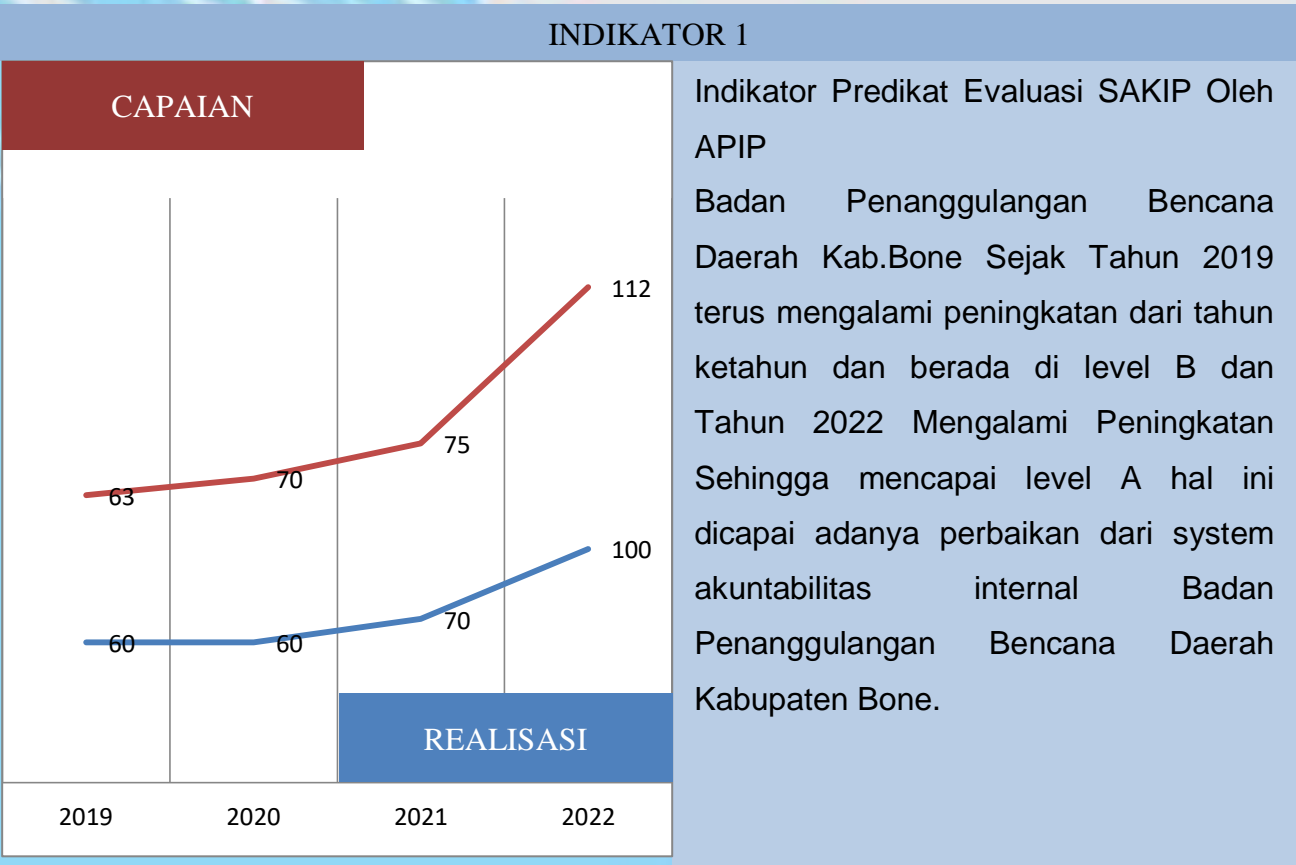
Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kinerja penanggulangan bencana	Predikat evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	BB	A	B 63,62	BB 70,63	BB	A
	Predikat Rata-rata capaian kinerja Program Teknis Badan Penangulan gan Bencana Daerah		—	85	99%	—	—	88	110
Meningkanya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu Sesuai SOP	100%	100%	75%	89%	50%	85%	75%	89%
	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	100%	100%	100%	100%	243%	178%	142%	118%
	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	42%	90%	70%	82%	52%	104%	78%	86%



	Sosial selama Masa Tanggap Darurat								
	Presentase Rehabilitasi dan rekonstuksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Data diolah BPBD Kab. Bone 2023



INDIKATOR 2

Predikat Rata-Rata Capaian Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Predikat Rata-rata Capaian Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone merupakan Indikator baru pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 dan mengalami peningkatan 99% dibandingkan dengan Baseline data yang ada dan melampaui target yang telah ditentukan

Layanan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

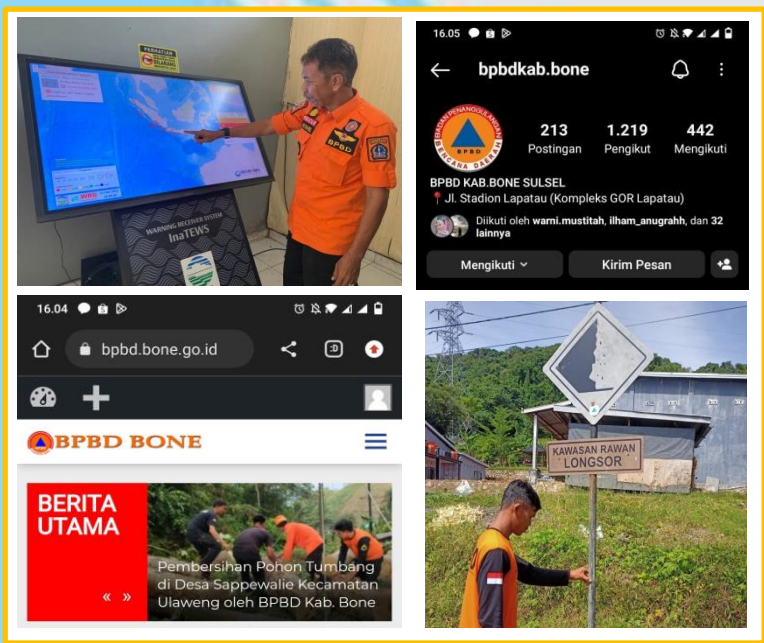


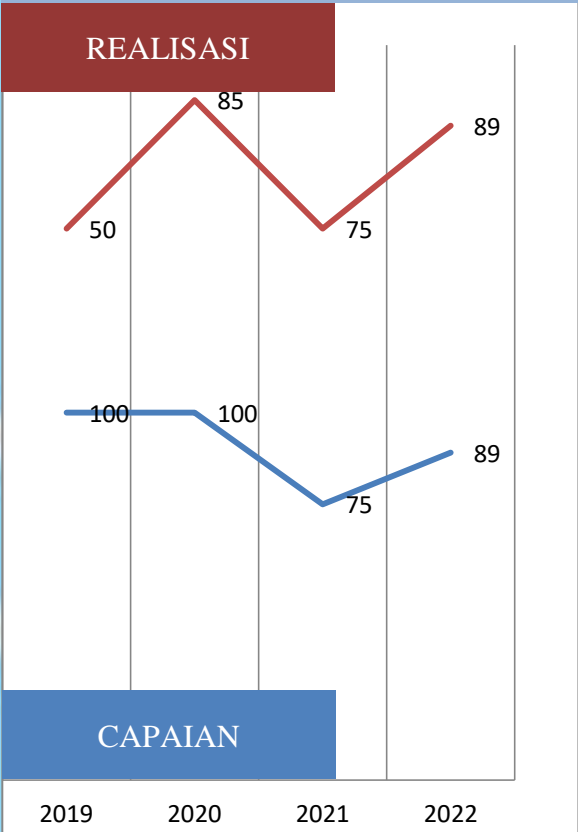
Foto Penyerahan Barang Logistik Untuk Masyarakat yang Terdampak Bencana



Pasca Bencana

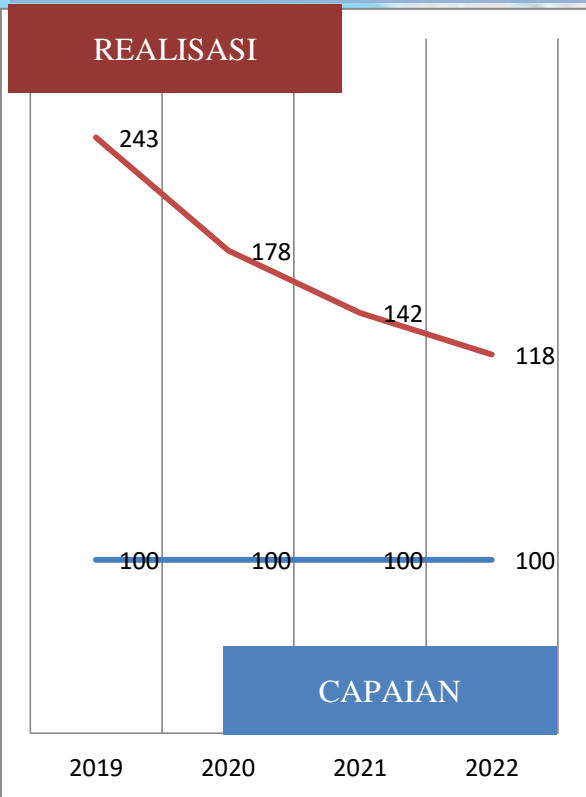


INDIKATOR 1



Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu Sesuai SOP Pada Diagram Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya mengalami fluktuasi disebabkan beberapa hal diantaranya adanya jumlah korban dan kejadian bencana yang juga mengalami fluktuasi, Adanya Covid 19 (Kejadian Luar Biasa),adanya refocusing anggaran.

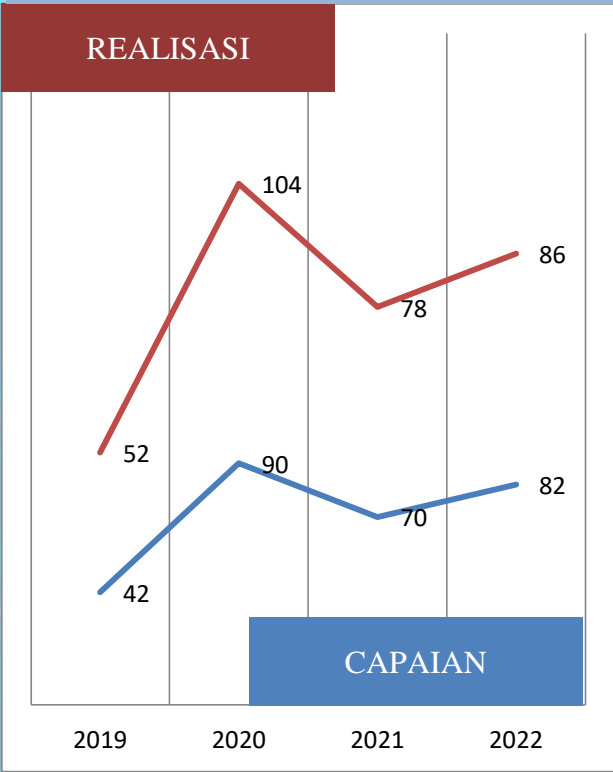
INDIKATOR 2



Presentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana Pada Diagram Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan disebabkan adanya penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) 2020-2024 dimana dokumen ini berlaku selama empat tahun yang merupakan salah satu program dan kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

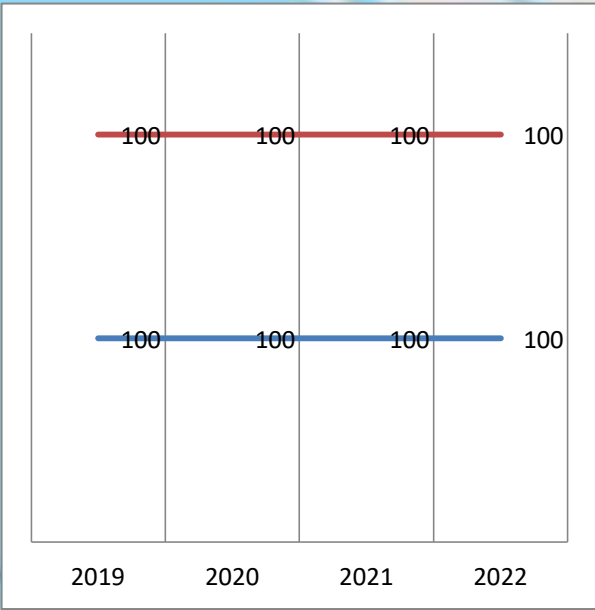


INDIKATOR 3



Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Pada Diagram Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya mengalami fluktuasi disebabkan beberapa hal diantaranya adanya jumlah korban dan kejadian bencana yang juga mengalami fluktuasi, Adanya Covid 19 (Kejadian Luar Biasa),adanya refocusing anggaran.

INDIKATOR 4



Presentase Rehabilitasi dan Rekonstuksi Daerah Korban Pasca Bencana
Pada Diagram Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya berada pada posisi yang sama ini disebabkan adanya bantuan anggaran hibah dari pusat (BNPB) yang merupakan program prioritas



3. Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini



Tabel. 3.4

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangkah Menengah Renstra Perubahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	BB	BB	A	BB	BB	A
	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	88	—	88	99%	88	100	113
Meningkanya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	75%	100 %	75%	89%	133%	100%	119%
	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	70%	90 %	70%	82%	129%	100%	117%
	Presentase Rehabilitasi dan rekonstuksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja pada sasaran 1 Indikator 1 pada Tahun 2020 yaitu 100%, Tahun 2021 75%, dan tahun 2022 89%, Indikator 2 pada Tahun 2020 yaitu 100%, Tahun 2021 yaitu 100, Tahun 2022 yaitu 100%, Indikator 3 pada Tahun 2020 yaitu 90%, Tahun 2021 70%, Tahun 2022 yaitu 82%, Indikator 4 pada Tahun 2020 yaitu 100%, Tahun 2021 100%, Tahun 2022 100%. Realisasi kinerja pada sasaran 2 dengan indikator kinerja1 tahun 2021 realisasinya 100%. indikator kinerja 2 tahun 2022 yaitu **99%**

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa Berikutnya dalam mengukur capaian kinerja Tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja kienrja indicator tujuan/sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana table berikut:

Tabel. 3.5

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Minimal	
	Strategis		Kinerja 2022	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan Dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana Yang Tertangani Tepat Waktu Sesuai SOP	89%	100%	89%
		Presentase Kecamatan Yang Memiliki Peta Rawan Bencana	100%	85%	100%
		Presentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	82%	95%	82%
		Presentase Rehabilitasi Dan Rekonstuksi Daerah Korban Pasca Bencana	100%	100%	100%

Sumber Data: Data diolah oleh BPBD Kab.Bone Tahun 2022



Badan Pelanggungan Bencana Daerah Kabupaten Bone Merupakan Salah Satu Pengampu SPM sesuai dengan Permedagri 100 Tahun 2018, dan Telah di ganti menjadi Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini disesuaikan dengan Program dan Kegiatan.

1. **Layanan Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Rawan** bencana dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, Jumlah masyarakat batas umur 7-70 tahun menerima layanan informasi sebanyak 698.791 Jiwa hal ini didukung oleh adanya kegiatan penyebaran informasi (Media) melalui, Sosialisasi, Inovasi, Web, Dokumen KRB, Brosur, Leaflet, Spanduk, Rambu-Rambu Bencana.

2. **Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan** berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, bahwa jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan dan Gladi Sebanyak 500 Orang, Jumlah warga negara yang ikut pelatihan Sebanyak 4500 Orang , Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 5000 orang, jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana Sebanyak 910 Jiwa (216 KK), Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 113.140 Jiwa, sarana prasarana penanggulangan bencana 87 Unit, Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia (SDM) 110 personil.

Hal tersebut diatas didukung adanya, Data jumlah penduduk Batas Umur 7-70 Tahun Perkecamatan, Daftar nama peserta sosialisasi, gladi dan pelatihan, Data/ Jumlah penduduk yang berada pada daerah yang terdapat pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS) yaitu kecamatan Tanete .Riattang, Tanete Riattang Barat (2 Unit), Kecamatan Tanate Riattang Timur, Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Tonra.

3. **Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana** dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, bahwa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana sebanyak 102 Orang, jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana sebanyak 13.76 Jiwa, Hal ini didukung adanya rekapitulasi Data/Jumlah ASN dan TRC, Pemetaan (Rekap) Data/Jumlah kejadian bencana yang tertangani, dan Jumlah KK/ Jiwa Korban Bencana.



Berdasarkan Data dan Informasi diatas dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bone mampu mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran dalam peningkatan standar pelayanan (SPM) yang merupakan salah satu tujuan nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis dapat dilihat dari tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja pada tabel berikut :

Tabel. 3.6
Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Kinerja Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100% (A)		√			
	Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	99%			√		
Meningkanya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	89%				√	
	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	118%		√			
	Presentase Korban Bencana yang	86%				√	



	menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat						
	Presentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana	100%		√			
Rata-Rata		102.5%			√		

Sumber Data: Data Diolah Oleh BPBD Kab.Bone 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 dalam kategori **Sangat Berhasil**

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENINGKATAN KINERJA

Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu Sesuai SOP

Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu Sesuai SOP dengan capaian 89% dengan perdikat **Cukup Berhasil** hal ini disebabkan adanya jumlah kejadian yang tidak dapat dipredikasi dan jumlah korban yang mengalami fluktuasi, adanya kejadian luar biasa (KLB) Covid 19, adanya refocusing anggaran, sarana dan parsarana yang belum memadai serta keterbatasan SDM, Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana.

Persentase Korban yang Menerima Batuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Dengan capaian 86% dengan menunjukkan Perdikat **cukup Berhasil**, hal ini disebabkan adanya jumlah kejadian dan jumlah korban bertambah dan tidak dapat diprediksi serta penyediaan logistik yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah korban.



Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu Sesuai SOP

Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu Sesuai SOP hal ini disebabkan adanya jumlah kejadian jumlah korban yang mengalami fluktuasi, adanya kejadian luar biasa (KLB) Covid 19, adanya refocusing anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai serta keterbatasan SDM.

Persentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana

Persentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana

Pencapaian yang dilakukan dalam pemenuhan persentase kecamatan yang memiliki peta rawan bencana adalah adanya penyusunan dokumen kajian resiko bencana (KRB) Tahun 2020-2024 yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan salah satu program prioritas yang diberikan kepada BPBD Kab/Kota.

Persentase Korban yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase Korban yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Berdasarkan hasil data dan Informasi yang telah direkap setiap tahun oleh bidang yang menangani hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jumlah kejadian yang tidak dapat diprediksi dan jumlah korban yang bertambah serta penyediaan logistik yang masih terbatas merupakan salah satu faktor utama yang menjadi perhatian dan masalah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana baik dari segi material maupun secara psikologis serta peningkatan sarana dan prasarana.

Persentase Rehabilitasi/ Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana

Persentase Rehabilitasi/ Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana

Untuk mencapai peningkatan atau pemenuhan persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone melakukan koordinasi dan konsultasi dengan



pihak terkait dalam hal ini BNPB untuk menindak lanjuti usulan prioritas dalam musrembang yang setiap tahunnya merupakan salah satu sistematisa penyusunan perencanaan dan penganggaran serta laporan hasil identifikasi, verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Dari semua indikator Penilaian Pencapaian Kinerja diatas dapat tepat sasaran jika semua didukung oleh komitmen bersama antara Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat dan semua unsur yang terkait serta didukung oleh beberapa aspek baik aspek kebijakan, pendanaan kerja sama (Mitra) Sumber daya, Kesadaran dan pemahaman maka jenis apapun kejadian bencana yang akan terjadi dapat terselesaikan dan terpenuhi sehingga akan tercipta Negara, Kecamatan, Kelurahan, Desa yang Tangguh Bencana, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Perkantoran, Gedung-gedung dan Semua Rumah Aman Bencana Sesuai Dengan Program Nasional (Program Nawa cita) dan Tentunya Menjadikan Salah-satu Komitmen Presiden Indonesia Negara Tangguh dan Siap Untuk Selamat (Ketangguhan dan Keselamatan)

Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Merupakan Indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasrakan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, DPPA, Perjnajian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone menargetkan Predikat BB dan Penilaian yang diperoleh dari hasil reviu Inspektorat Daerah 90% dengan predikat A

Pencapaian diatas telah mencapai target namun masih terdapat hambatan dalam pencapaian yang lebih maksimal yakni dalam point Evaluasi Internal yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum Maksimal.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Bdan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Melaksanakan Rapat Kerja dalam Penyusunan dokumen Perencanaan.
2. Melakukan sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiatan
3. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan setiap triwulan
4. Melaksanakan langkah`- langkah preventif dalam pencapaian kinerja



Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana

Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana.

Untuk mencapai target presentase rata-rata capaian kinerja program teknis BPBD Kab. Bone dilakukan melalui kebijakan yaitu meningkatkan responsibilitas penanganan dan penanggulangan Bencana baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat (Saat kejadian) dan Pasca Bencana.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian dengan sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana dengan indikator

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kab. Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:



Tabel. 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e (d/c x100%)	F	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana	Perdikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	BB	A	3.286.016.176	3.260.376.512	99%	13
	Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	90	99	110	2.011.430.450	2.002.193.595	100%	10
Meningkanya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	89%	89%	1.287.300.000	1.286.029.400	100%	-11









Pasca Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	85%	100%	118%	136.870.000	136.808.295	100%	18
	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	95%	82%	86%	55.820.950	55.413.900	99%	-13
	Presentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana	100%	100%	100%	457.310.000	453.400.500	99%	1

Sumber Data : Diolah BPBD Kab. Bone 2022



Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone 2022 terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1.Indikator : Perdikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP dengan capaian kinerja A (112%) dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 1% dan efisiensi penganggaran sumber daya sebesar -1%.		Efisiensi 13 %
		Efisien -1%
2. Indikator : Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana dengan capaian kinerja 99% dan capaian anggaran 100%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 1% dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 9%.		Efisiensi 10%
		Efisien 9%
1. Indikator : Persentase masyarakat korban bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP dengan capaian kinerja 89% dan capaian ang garan 100%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 0 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar -11%.		Efisiensi 11%
		Efisien -11%



2. Indikator : Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana dengan capaian kinerja 118% dan capaian anggaran 100%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 0% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 78%.



**Efisiensi
18%**



**Efisien
78%**

3. Indikator : Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat dengan capaian kinerja 86% dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 0% dan efisien pengngnaan sumber daya sebesar 13%.



**Efisiensi
13%**



**Efisien
13%**

4. Indikator : Presentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 1% dan efisien pengangraan sumber daya sebesar -1%.



**Efisiensi
1%**



**Efisien
-1%**



7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga (Prediksi) sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone di Tahun 2022 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 juga mengelola dana/anggaran bantuan social sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830), Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban dan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dan Keputusan Bupati Nomor 490 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung melalui Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk kejadian Luar Biasa (KLB) Covid 19.



Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan jenis bencana Angin Putting Beliung dilokasi kejadian dikecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, dan Kecamatan Besngo dengan jumlah rumah sebanyak 109 rumah dengan kondisi kerusakan ringan sebanyak 52 rumah, kerusakan sedang 29 rumah, kerusakan berat sebanyak 22 rumah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 229.967.000,- Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel. 3.8

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana	Perdikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	A	Perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	100	100	1. Penentuan Target serta Perencanaan anggaran yang harus dioptimalkan 2. Peningkatan Kapasitas SDM dan SARPRAS
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	5	5	100	



					Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	2	100	
					Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perangkat Daerah	1	1	100	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi Perangkat Daerah	1	1	100	
		Presentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	110	Perencanaan penganggran dan evakuasi perangkat daerah	Presentase rata-rata realisasi capaian kinerja program teknis BPBD	100	99%	110	
				Koordinasi dan Penyusunan Lpaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Laopran Capaian Kinerja dan Realisasi yang tersusun	2	2	100	
					Jumlah pameran pembangunanyang diikuti	0	0	100	



2	Meningkanya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	89%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100	89	89	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarpras dan Pemenuhan penyediaan logistic yang memadai dlm pelaksanaan kegiatan 2. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan semacamnya 3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimal kan pelaksanaan penanggulan
---	--	---	-----	--------------------------------	---	-----	----	----	--



									gan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta in, dunia usaha serta instansi/lembaga pemerhati bencana
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana kab/Kota	Jumlah warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	4050	4050	100	
				Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi ,Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota	Jumlah Sekolah yang menjadin sasaran sosialisasi Penanggulangan bencana	5	5	100	
		Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	118%	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	18.791	18.791	100	



				Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pemantauan Lokasi daerah rawan bencana	80	80	100	
		Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	86%	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
		Presentase Rehabilitasi/R ekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana	100%	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Peninjauan Lokasi dan Penangan Korban Bencana	80	80	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Jasa/Upah Kerja dan Moakan minum TRC yaNg melakukan Posko Siaga Bencana	980	980	100	
				Pelayan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4.050	4.050	100%	



				Sub Kegiatan penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pasca bencana	1	1	100	
					Jumlah lokasi yang diidentifikasi dan diverifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana	30	30	100	
					Jumlah Paket Rehabilitasi /Pemeliharaan Jan dan Jemabtan	2	2	100	

Sumber Data: Diolah oleh BPBD KAB.Bone 2022



Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuptaen Bone pada tahun 2022 dengan melalui beberapa analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana

1. Belum Optimalnya Ketersediaan Data dan Informasi Kejadian Bencana
2. Masih Rendahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, terbatasnya Jumlah Anggaran, terbatasnya Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana serta belum optimalnya koordinasi antar SKPD terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.
3. Penanganan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada saat Darurat Bencana sesuai harapan baik soal kebutuhan sarana, prasarana, maupun jumlah bantuan logistik terutama kepada kelompok rentan serta belum optimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan bencana.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar **Rp.5.297.446.626,-** (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). dengan Realisasi Anggran **Rp. 5. 262.570.107** (Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Rupiah) atau capaian sebesar **99,34%** sebagaimana tabel sebagai berikut:



Tabel 3.9
Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan			
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.011.430.450	2.002.193.595	99
Sasaran 1			
Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana	3.286.016.176	3.260.376.512	99
Program:			
PENUNGGJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.286.016.176	3.286.016.176	99
Program:			
Meningkatkan Resposibilitas Penanganan dan Penaggulangan Bencana	Rp.5.297.446.626	Rp. 5.262.570.107	99,34
Sasaran 2			
Meningkatnya Kesiapsiagaan Penaggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	2.011.430.450	2.002.193.595	99
Total	Rp.5.297.446.626	Rp. 5.262.570.107	99,34

Sumber Data: DPA 2022





PENUTUP

A. SIMPULAN

B. KENDALA

BAB

4



A. Simpulan Umum

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone pada tahun 2022 adalah cukup baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, 2 indikator yang telah mencapai target dan 1 indikator kurang dari target.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah 102,5 dan tergolong (Berhasil), hal ini disebabkan oleh beberapa factor dan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) tahun 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.



Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone ke depan. Bagi instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sendiri, ini menjadi perhatian dan masukan bahwa perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJiP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana kedepannya dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKJiP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

KENDALA PELAKSAAN DAN UPAYA MENGATASI			
KENDALA		UPAYA MENGATASI	
1.	Belum Optimalnya Ketersediaan Data dan Informasi Kejadian Bencana	1.	Perlu adanya Laporan Data dan Informasi melalui pendataan korban secara cepat , tepat dan akurat serta terpercaya
2.	Masih Rendanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, Jumlah Anggaran, Jumlah Sarana dan Prasarana dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Penanggulangan Bencana	2.	Perlu adanya Peningkatan SDM dibidang Kebencanaan, peningkatan Sarana dan Prasarana dlm penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peningkatan Ketersediaan Bantuan Logistik korban bencana serta pelayanan korban bencana sesuai SOP
3.	Penanganan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada saat Darurat Bencana sesuai harapan baik soal kebutuhan sarana, prasarana,maupun jumlah bantuan logistik terutama kepada kelompok rentan serta belum optimalnya peran pihak swasta dalam usaha pengurangan resiko bencana.	3.	Perlu adanya Peningkatan sarana dan prasaran dalam melakukan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP serta membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana terhadap semua lapisan masyarakat,dunia usaha (Swasta), dan lembaga/Instansi pemerhati bencana



LAMPIRAN



Matriks Renstra



Cascading Kinerja



Perjanjian Kinerja



Pengukuran Kinerja



RENCANA AKSI



IKU BPBD



CROSSCUTTING



EVALUASI RENJA



**CAPAIAN OUTPUT &
OUTCOME**



EVALUASI PERTRIWULAN



TINDAK LANJUT LHE



IKI BPBD



POHON KINERJA



RENSGTRA



RENJA



PENGHARGAAN



INOVASI



CAPAIAN KINERJA

